

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN
INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

CONTOH FORMAT DOKUMEN DALAM RANGKA PEMBERIAN PEMBEBASAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING
DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
BEBAS

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah atas Penyerahan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara
Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya, dengan ini:

Nomor Identitas Perpajakan : (4)
Nama : (5)
Alamat : (6)
Jabatan : (7)
Awal Penugasan : (8)
Nomor Identitas Perpajakan
Pemberi Kerja : (9)
Nama Pemberi Kerja : (10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan
Internasional serta Pejabatnya dengan:

1. Surat rekomendasi dari(11)..... dengan:
 - a. nomor surat rekomendasi : (12)
 - b. tanggal surat rekomendasi : (13)

2. Data Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diajukan Pembebasan adalah sebagai berikut: (14)

No.	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantum	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-

3. Data lawan transaksi sebagai berikut:

- a. NPWP lawan transaksi :..... (15)
- b. Nama lawan transaksi :..... (16)
- c. Alamat lawan transaksi :..... (17)

Dengan ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1. surat rekomendasi;
- 2. dokumen pendukung berupa: (18)
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Apabila data yang kami sampaikan dalam permohonan ini tidak benar, kami bersedia menanggung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., (19)

..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS

- (1) Diisi dengan nomor permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas.
- (2) Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas, contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- (3) Diisi dengan Badan dan Orang Asing atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional terdaftar.
- (4) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas.
- (5) Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas.
- (6) Diisi dengan alamat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas.
- (7) Diisi dengan jabatan Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas, dalam hal Pembebasan diberikan kepada Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional.
- (8) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penugasan Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional.
- (9) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional tempat pejabat bertugas.
- (10) Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional tempat pejabat bertugas
- (11) Diisi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (12) Diisi dengan nomor surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (13) Diisi dengan tanggal surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (14) Tabel rincian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diajukan Pembebasan:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - Kolom 4 : diisi dengan nilai perolehan;
 - Kolom 5 : diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;
 - Kolom 6 : diisi dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
 - Kolom 7 : diisi dengan keterangan.

- (15) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (16) Diisi dengan nama pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (17) Diisi dengan alamat pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (18) Diisi dengan rincian dokumen pendukung yang dilampirkan.
- (19) Diisi dengan kota dan tanggal pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas.
- (20) Diisi dengan tanda tangan dan nama pihak yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN RINCIAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR

SURAT PERNYATAAN RINCIAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nomor Identitas Perpajakan :..... (1)
Nama :..... (2)
Jabatan :..... (3)
Alamat :..... (4)

bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Negara Asing/Pejabat Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/Pejabat Badan Internasional *):

Nomor Identitas Perpajakan :..... (5)
Nama :..... (6)
Alamat :..... (7)

dengan ini menyampaikan rincian kepemilikan kendaraan bermotor sebagai berikut: (8)

No.	Nama Pemilik	Nomor Registrasi	Jenis	Model	Tahun Registrasi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

Demikian surat pernyataan rincian kepemilikan kendaraan bermotor dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., (9)

..... (10)

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN RINCIAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR

- (1) Diisi dengan nomor identitas perpajakan pihak yang menandatangani surat pernyataan rincian kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Diisi dengan nama pihak yang menandatangani surat pernyataan rincian kepemilikan kendaraan bermotor.
- (3) Diisi dengan jabatan pihak yang menandatangani surat pernyataan rincian kepemilikan kendaraan bermotor.
- (4) Diisi dengan alamat pihak yang menandatangani surat pernyataan rincian kepemilikan kendaraan bermotor.
- (5) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang menyampaikan surat pernyataan rincian kepemilikan kendaraan bermotor.
- (6) Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang menyampaikan surat pernyataan rincian kepemilikan kendaraan bermotor.
- (7) Diisi dengan alamat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang menyampaikan surat pernyataan rincian kepemilikan kendaraan bermotor.
- (8) Tabel rincian kepemilikan kendaraan bermotor diisi sesuai dengan informasi pada surat tanda nomor kendaraan bermotor:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama pemilik kendaraan bermotor;
 - Kolom 3 : diisi dengan nomor registrasi/nomor polisi kendaraan bermotor;
 - Kolom 4 : diisi dengan jenis kendaraan bermotor;
 - Kolom 5 : diisi dengan model kendaraan bermotor;
 - Kolom 6 : diisi dengan tahun registrasi kendaraan bermotor.
- (9) Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan surat pernyataan rincian kepemilikan kendaraan bermotor.
- (10) Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan surat pernyataan rincian kepemilikan kendaraan bermotor.

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

Nomor : (1)
Tanggal : (2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak(3) dengan ini menerangkan bahwa Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional tersebut di bawah ini:

Nomor Identitas Perpajakan :..... (4)
Nama :..... (5)
Alamat :..... (6)
Jabatan :..... (7)

Sesuai dengan Surat Rekomendasi dari (8) nomor (9), tanggal (10) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 diberikan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana terlampir.

Surat Keterangan Bebas ini hanya dapat digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku terkait Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

Surat Keterangan Bebas diberikan terbatas untuk barang dan/atau jasa sebagaimana terlampir dan berlaku untuk satu kali transaksi.

Surat Keterangan Bebas ini beserta lampirannya agar diserahkan kepada:

NPWP :..... (11)
Nama :..... (12)
Alamat :..... (13)

Demikian untuk digunakan seperlunya.

....., (14)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

..... (15)

LAMPIRAN

Surat Keterangan Bebas

Nomor :..... (16)

Tanggal :..... (17)

Daftar Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Memperoleh Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: (18)

No.	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantum	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

- (1) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- (2) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas.
- (3) Diisi dengan Badan dan Orang Asing atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional terdaftar.
- (4) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang diberikan Pembebasan.
- (5) Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang diberikan Pembebasan.
- (6) Diisi dengan alamat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang diberikan Pembebasan.
- (7) Diisi dengan jabatan Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional yang diberikan Pembebasan dalam hal Pembebasan diberikan kepada Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional.
- (8) Diisi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang memberikan rekomendasi pemberian Pembebasan.
- (9) Diisi dengan nomor surat rekomendasi.
- (10) Diisi dengan tanggal penerbitan surat rekomendasi.
- (11) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (12) Diisi dengan nama pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (13) Diisi dengan alamat pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (14) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Bebas.
- (15) Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.
- (16) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- (17) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas.
- (18) Daftar Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
Kolom 4 : diisi dengan nilai perolehan;
Kolom 5 : diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;
Kolom 6 : diisi dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
Kolom 7 : Diisi dengan keterangan.
- (19) Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DAPAT DIPROSES

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA TIDAK DAPAT DIPROSES

Nomor : (1)
Tanggal : (2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak(3) memberitahukan bahwa permohonan Surat Keterangan Bebas nomor(4) tanggal(5), yang diajukan oleh Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional di bawah ini:

Nomor Identitas Perpajakan : (6)
Nama : (7)
Alamat : (8)
Jabatan : (9)
tidak dapat diproses karena:(10)

tidak disertai surat rekomendasi

tidak dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:

proforma invoice dan *purchase order* atau dokumen lain yang dapat dipersamakan;

bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;

surat pernyataan rincian kendaraan bermotor (dalam hal perolehan kendaraan bermotor);

dokumen perikatan jual beli kendaraan bermotor (dalam hal perolehan kendaraan bermotor);

lainnya,.....

lainnya,.....

Demikian untuk dimaklumi.

....., (11)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DAPAT DIPROSES

- (1) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Permohonan Surat Keterangan Bebas Tidak Dapat Diproses.
- (2) Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Permohonan Surat Keterangan Bebas Tidak Dapat Diproses.
- (3) Diisi dengan Badan dan Orang Asing atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional terdaftar.
- (4) Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (5) Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (6) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan Pembebasan.
- (7) Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan Pembebasan.
- (8) Diisi dengan alamat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan Pembebasan.
- (9) Diisi dengan jabatan Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan Pembebasan dalam hal Pembebasan diajukan oleh Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional.
- (10) Diisi dengan alasan permohonan Surat Keterangan Bebas tidak dapat diproses.
- (11) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan permohonan Surat Keterangan Bebas tidak dapat diproses.
- (12) Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat pemberitahuan permohonan Surat Keterangan Bebas tidak dapat diproses.

E. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Hal : Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya, dengan ini:

Nomor Identitas Perpajakan : (4)
Nama : (5)
Alamat : (6)
Jabatan : (7)
Nomor Identitas Perpajakan
Pemberi Kerja : (8)
Nama Pemberi Kerja : (9)

mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya nomor..... (10), tanggal.....(11) karena

1. salah tulis;
2. salah hitung; dan/atau
3. kesalahan penerapan undang-undang,

dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat rekomendasi dari(12) dengan:
- a. nomor surat rekomendasi : (13)
- b. tanggal surat rekomendasi : (14)
2. Semula: (15)

No.	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantum	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-

3. Menjadi: (16)

No.	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantum	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-

4. Data lawan transaksi sebagai berikut:

- a. NPWP lawan transaksi :..... (17)
- b. Nama lawan transaksi :..... (18)
- c. Alamat lawan transaksi :..... (19)

Dengan ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1. surat rekomendasi; dan
- 2. dokumen pendukung berupa: (20)
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Apabila data yang kami sampaikan dalam permohonan ini tidak benar, kami bersedia menanggung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

....., (21)

..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS

- (1) Diisi dengan nomor permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas.
- (2) Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas, contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- (3) Diisi dengan Badan dan Orang Asing atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional terdaftar.
- (4) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas.
- (5) Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas.
- (6) Diisi dengan alamat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas.
- (7) Diisi dengan jabatan Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas dalam hal pihak yang mengajukan permohonan penggantian adalah Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional.
- (8) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional tempat pejabat bertugas.
- (9) Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional tempat pejabat bertugas.
- (10) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas yang diajukan penggantian.
- (11) Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas yang diajukan penggantian.
- (12) Diisi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (13) Diisi dengan nomor surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (14) Diisi dengan tanggal surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (15) Diisi dengan rincian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak semula yang akan diganti:
 - Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - Kolom 4 : diisi dengan nilai perolehan;
 - Kolom 5 : diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;

Kolom 6 : diisi dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;

Kolom 7 : diisi dengan keterangan.

Contoh, semula:

No.	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantum	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	Lemari Es Merek "XYZ"	2 unit	50.000.000	5.500.000	0	Nomor Invois: 111
2	Televisi Merek "ABCD"	2 unit	60.000.000	6.600.000	0	Nomor Invois: 112
3	Sepeda Motor	1 unit	250.000.000	27.500.000	0	Nomor Invois: 113

(16) Diisi dengan rincian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak pengganti:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Kolom 4 : diisi dengan nilai perolehan;

Kolom 5 : diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;

Kolom 6 : diisi dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Kolom 7 : diisi dengan keterangan

Contoh, menjadi:

No.	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantum	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	Lemari Es Merek "XYZ"	2 unit	50.000.000	5.500.000	0	Nomor Invois: 111
2	Televisi Merek "EFGH"	2 unit	60.000.000	6.600.000	0	Nomor Invois: 112

(17) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

(18) Diisi dengan nama pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

(19) Diisi dengan alamat pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

(20) Diisi dengan rincian dokumen pendukung yang dilampirkan.

(21) Diisi dengan kota dan tanggal pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas.

(22) Diisi dengan tanda tangan dan nama pihak yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas.

F. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

Nomor : (1)
Tanggal : (2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak(3) dengan ini menerangkan bahwa Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional tersebut di bawah ini:

Nomor Identitas Perpajakan : (4)
Nama : (5)
Alamat : (6)
Jabatan : (7)

Sesuai dengan Surat Rekomendasi dari (8) nomor (9), tanggal (10) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 diberikan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai nomor(11) tanggal(12) sesuai dengan permohonan penggantian nomor(13) tanggal(14)/secara jabatan)* dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pengganti ini berlaku sejak tanggal(15)

Surat Keterangan Bebas pengganti ini hanya dapat digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku terkait Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

Surat Keterangan Bebas pengganti diberikan terbatas untuk barang dan/atau jasa sebagaimana terlampir dan berlaku untuk satu kali transaksi.

Surat Keterangan Bebas pengganti ini beserta lampirannya agar diserahkan kepada:

NPWP : (16)
Nama : (17)
Alamat : (18)

Demikian untuk digunakan seperlunya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

..... (19)

Salinan Surat Keputusan Bebas pengganti ini disampaikan kepada(20)

LAMPIRAN

Surat Keterangan Bebas Pengganti

Nomor :..... (21)

Tanggal :..... (22)

Daftar Pengganti Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
Memperoleh Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: (23)

No.	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantum	Nilai Transaksi (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

..... (24)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

- (1) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas pengganti.
- (2) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas pengganti.
- (3) Diisi dengan Badan dan Orang Asing atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional terdaftar.
- (4) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang diberikan Pembebasan.
- (5) Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang diberikan Pembebasan.
- (6) Diisi dengan alamat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang diberikan Pembebasan.
- (7) Diisi dengan jabatan Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional yang diberikan Surat Keterangan Bebas pengganti dalam hal Pembebasan diberikan kepada Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional.
- (8) Diisi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (9) Diisi dengan nomor surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (10) Diisi dengan tanggal surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (11) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas semula.
- (12) Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas semula.
- (13) Diisi dengan nomor permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas.
- (14) Diisi dengan tanggal permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas.
- (15) Diisi dengan tanggal berlaku Surat Keterangan Bebas semula.
- (16) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (17) Diisi dengan nama pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (18) Diisi dengan alamat pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (19) Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas pengganti.
- (20) Diisi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (21) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas pengganti
- (22) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas pengganti.

- (23) Daftar pengganti BKP dan/atau JKP yang mendapatkan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:
- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
 - Kolom 2 : diisi dengan nama nama/jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - Kolom 4 : diisi dengan nilai perolehan;
 - Kolom 5 : diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;
 - Kolom 6 : diisi dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
 - Kolom 7 : diisi dengan keterangan.
- (24) Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas pengganti.

G. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

Nomor : (1)

Tanggal : (2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak(3) menerangkan bahwa atas permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas nomor(4) tanggal(5), yang diajukan oleh Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional di bawah ini:

Nomor Identitas Perpajakan :..... (6)

Nama :..... (7)

Alamat :..... (8)

Jabatan :..... (9)

tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Bebas pengganti karena:(10)

tidak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung pada Surat Keterangan Bebas

seluruh objek memenuhi ketentuan

tidak dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:

proforma invoice dan salinan *purchase order* atau dokumen lain yang dapat dipersamakan

bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara

surat rekomendasi saat penerbitan Surat Keterangan Bebas yang dimohon untuk diganti

lainnya,.....

lainnya,.....

Demikian untuk dimaklumi.

..... (11)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PENGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

- (1) Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas pengganti.
- (2) Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas pengganti.
- (3) Diisi dengan Badan dan Orang Asing atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional terdaftar.
- (4) Diisi dengan nomor permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas.
- (5) Diisi dengan tanggal permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas.
- (6) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas.
- (7) Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas pengganti.
- (8) Diisi dengan alamat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas pengganti.
- (9) Diisi dengan jabatan Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional yang mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas dalam hal permohonan penggantian diajukan oleh Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional.
- (10) Diisi dengan alasan Surat Keterangan Bebas pengganti tidak dapat diterbitkan.
- (11) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya surat penolakan Surat Keterangan Bebas pengganti.
- (12) Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat penolakan Surat Keterangan Bebas pengganti.

H. CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

Nomor : (1)
Tanggal : (2)

Sehubungan diperolehnya data/informasi yang menunjukkan bahwa:

1. Pemohon tidak berhak untuk memperoleh Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
2. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak bukan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dapat diberikan Pembebasan; dan/atau
3. Pemohon tidak memberikan informasi dengan benar atau sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak menyampaikan tetapi tidak benar atau sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan dokumen pendukung,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, atas Surat Keterangan Bebas/Surat Keterangan Bebas pengganti* nomor(3) tanggal(4) yang diberikan kepada Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional tersebut di bawah ini:

Nomor Identitas Perpajakan : (5)
Nama : (6)
Alamat : (7)
Jabatan : (8)

dibatalakan dan dinyatakan tidak berlaku.

Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

..... (9)

*) Coret yang tidak perlu

Salinan pembatalan Surat Keterangan Bebas ini disampaikan kepada (10)

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

- (1) Diisi dengan nomor Pembatalan Surat Keterangan Bebas.
- (2) Diisi dengan tanggal penerbitan Pembatalan Surat Keterangan Bebas.
- (3) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas yang dibatalkan.
- (4) Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas yang dibatalkan.
- (5) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang diberikan Pembebasan.
- (6) Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang diberikan Pembebasan.
- (7) Diisi dengan alamat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang diberikan Pembebasan.
- (8) Diisi dengan jabatan pihak yang diterbitkan Pembatalan Surat Keterangan Bebas dalam hal Pembatalan Surat Keterangan Bebas diterbitkan kepada Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional.
- (9) Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Pembatalan Surat Keterangan Bebas.
- (10) Diisi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang menerbitkan surat rekomendasi.

I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN DAN/ATAU PENGALIHMANFAATAN

BERITA ACARA
PEMINDAHTANGANAN DAN/ATAU PENGALIHMANFAATAN

Pada hari ini (1) tanggal (2), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nomor Identitas Perpajakan : (3)
Nama : (4)
Jabatan : (5)
Alamat : (6)
dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA (pihak yang memindahtangankan atau mengalihmanfaatkan).
- II. Nomor Identitas Perpajakan/NPWP : (7)
Nama : (8)
Jabatan : (9)
Alamat : (10)
dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA (pihak yang menerima).

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah memindahtangankan Barang Kena Pajak dan/atau mengalihmanfaatkan Jasa Kena Pajak kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut: (11)

No.	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantitas	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua), dengan satu lembar/berkas dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lembar/berkas dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

....., (12)

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

..... (14)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN DAN/ATAU
PENGALIHMANFAATAN

- (1) Diisi dengan nama hari saat pembuatan Berita Acara Pemindahtanganan atau Pengalihmanfaatan.
- (2) Diisi dengan tanggal saat pembuatan Berita Acara Pemindahtanganan atau Pengalihmanfaatan.
- (3) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang memindahtanganan atau mengalihmanfaatkan.
- (4) Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang memindahtanganan atau mengalihmanfaatkan.
- (5) Diisi dengan jabatan Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional yang memindahtanganan atau mengalihmanfaatkan dalam hal pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan dilakukan oleh Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional.
- (6) Diisi dengan alamat pihak yang memindahtanganan atau mengalihmanfaatkan.
- (7) Diisi dengan nomor identitas perpajakan atau nomor pokok wajib pajak (NPWP) pihak yang menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan ketentuan:
 - a. diisi nomor identitas perpajakan jika pihak yang menerima adalah sesama Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya; atau
 - b. diisi NPWP jika pihak yang menerima adalah pemerintah Indonesia.
- (8) Diisi dengan nama pihak yang menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (9) Diisi dengan jabatan pihak yang menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan dilakukan kepada Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional.
- (10) Diisi dengan alamat pihak yang menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- (11) Tabel rincian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:

Kolom 1	:	diisi dengan nomor urut;
Kolom 2	:	diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dipindahtanganan atau dialihmanfaatkan;
Kolom 3	:	diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dipindahtanganan atau dialihmanfaatkan;
Kolom 4	:	diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas atau Nomor Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau keterangan lainnya.
- (12) Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Berita Acara Pemindahtanganan atau Pengalihmanfaatan.
- (13) Diisi dengan tanda tangan dan nama pihak pertama.
- (14) Diisi dengan tanda tangan dan nama pihak kedua.

J. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMINDAHTANGANAN DAN/ATAU PENGALIHMANFAATAN

LAPORAN PEMINDAHTANGANAN DAN/ATAU PENGALIHMANFAATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nomor Identitas Perpajakan :..... (1)
Nama :..... (2)
Jabatan :..... (3)
Alamat :..... (4)

bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Negara Asing/Pejabat Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/Pejabat Badan Internasional:

Nomor Identitas Perpajakan :..... (5)
Nama :..... (6)
Alamat :..... (7)

dengan ini menyampaikan laporan pemindahtanganan atas Barang Kena Pajak dan/atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak yang telah diberikan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai berikut (8):

No.	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantitas	Pihak yang Menerima	
			Nama	Nomor Identitas Perpajakan / NPWP / NIK
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

Bersama ini dilampirkan:

- Berita Acara Pemindahtanganan atau Pengalihmanfaatan
- Bukti Setoran Pembayaran Kembali

Demikian laporan keputusan pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PEMINDAHTANGANAN DAN/ATAU PENGALIHMANFAATAN

- (1) Diisi dengan nomor identitas perpajakan pihak yang menandatangani laporan pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan.
- (2) Diisi dengan nama pihak yang menandatangani laporan pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan.
- (3) Diisi dengan jabatan pihak yang menandatangani laporan pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan.
- (4) Diisi dengan alamat pihak yang menandatangani laporan pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan.
- (5) Diisi dengan nomor identitas perpajakan pihak yang menyampaikan laporan pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan .
- (6) Diisi dengan nama pihak yang menyampaikan laporan pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan.
- (7) Diisi dengan alamat pihak yang menyampaikan laporan pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan.
- (8) Tabel rincian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 : diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dipindahtangankan atau dialihmanfaatkan;
Kolom 3 : diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dipindahtangankan atau dialihmanfaatkan;
Kolom 4 : diisi dengan nama pihak yang menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
Kolom 5 : diisi dengan nomor identitas perpajakan atau nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor identitas kependudukan (NIK) pihak yang menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan ketentuan:
 - a. diisi nomor identitas perpajakan jika pihak yang menerima adalah sesama Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya;
 - b. diisi NPWP jika pihak yang menerima adalah pemerintah Indonesia atau subjek pajak badan; atau
 - c. diisi NPWP atau NIK jika pihak yang menerima adalah subjek pajak orang pribadi.
- (9) Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan laporan pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan.
- (10) Diisi dengan tanda tangan dan nama pihak yang menandatangani laporan pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan.

K. CONTOH KASUS PEMINDAHTANGANAN DAN/ATAU PENGALIHMANFAATAN

Contoh 1. Pemindahtanganan Barang Kena Pajak (BKP) yang telah mendapatkan fasilitas Pembebasan.

Mr. Leo adalah warga negara Polandia yang merupakan pejabat pada kedutaan besar negara Polandia untuk Indonesia. Mr. Leo mulai bertugas di Indonesia tanggal 7 Februari 2024. Mr. Leo membeli 2 (dua) buah laptop pada tanggal 21 Februari 2024 dengan total harga Rp80.000.000,00 (masing-masing senilai Rp40.000.000,00) sebelum PPN. Atas pembelian tersebut Mr. Leo mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar Rp8.800.000,00. Pada tanggal 10 Oktober 2024, Mr. Leo memindahtangankan salah satu laptop tersebut kepada Tn. Bram, seorang WNI yang juga bekerja di kedutaan besar Polandia.

Ketentuan:

2. BKP yang telah mendapatkan fasilitas tidak boleh dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau diperoleh.
3. Apabila dipindahtangankan sebelum jangka waktu 4 tahun, harus membayar kembali fasilitas Pembebasan yang telah didapatkan kecuali jika dipindahtangankan kepada sesama penerima fasilitas (Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional) atau jika dipindahtangankan kepada pemerintah Indonesia.
4. Mr. Leo harus membayar kembali fasilitas Pembebasan yang telah didapatkan atas pemindahtanganan laptop kepada Tn. Bram yaitu sebesar Rp4.400.000,00.

Contoh 2. Pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak yang telah mendapatkan fasilitas Pembebasan.

Ms. Santi adalah warga negara Malaysia dan merupakan pejabat pada UNESCO yang bertugas di Indonesia. Ms. Santi mulai bertugas di Indonesia tanggal 3 Februari 2023. Ms. Santi menyewa sebuah apartemen selama 2 tahun sejak tanggal 7 Februari 2023 s.d. tanggal 6 Februari 2025 dengan nilai Rp120.000.000,00 sebelum PPN. Atas persewaan tersebut Ms. Santi mendapatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN sebesar Rp13.200.000,00. Pada tanggal 1 Agustus 2024 Ms. Santi dipindahtugaskan ke negara Thailand. Atas persewaan apartemen tersebut dialihmanfaatkan pada tanggal 3 Agustus 2024 kepada Tn. Ariyanto seorang WNI yang juga bekerja di UNESCO.

Ketentuan:

1. JKP yang telah mendapatkan fasilitas tidak boleh dialihmanfaatkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.
2. Apabila dialihmanfaatkan sebelum jangka waktu 4 tahun, harus membayar kembali fasilitas Pembebasan yang telah didapatkan kecuali jika dialihmanfaatkan kepada sesama penerima fasilitas (Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional atau Pejabat Badan Internasional) atau jika dialihmanfaatkan kepada pemerintah Indonesia.
3. Ms. Santi harus membayar kembali fasilitas Pembebasan yang telah didapatkan atas pengalihmanfaatan persewaan apartemen kepada Tn. Ariyanto sebesar:
$$= \frac{6 \text{ bulan (3 Agustus 2024 s.d. 6 Februari 2024)}}{24 \text{ bulan}} \times \text{Rp}13.200.000,00$$

=Rp3.300.000,00

Contoh 3. Pemindahtanganan dan/atau pengalihmanfaatan yang ditemukan setelah masa tugas berakhir.

Mr. Nico Zain merupakan warga negara Rumania yang bekerja sebagai pejabat di kedutaan besar Rumania untuk Indonesia. Mr. Nico Zain bertugas dari tanggal 18 Januari 2023 s.d. 22 Desember 2024 dan meninggalkan Indonesia pada tanggal 30 Desember 2024. Selama bertugas di Indonesia Mr. Nico Zain membeli barang-barang sebagai berikut:

Tanggal perolehan	Nama barang	Harga/nilai sebelum PPN (Rp)	PPN yang dibebaskan (Rp)
21-01-2023	Laptop A	40.000.000	4.400.000
22-02-2023	Mobil	500.000.000	55.000.000
23-03-2024	Panci	10.000.000	1.100.000
25-05-2024	Sofa	20.000.000	4.400.000

Mr. Nico Zain tidak membuat laporan pemindahtanganan dan/atau pengalihmanfaatan pada akhir masa tugasnya. Pada bulan Januari tahun 2025 ditemukan bahwa mobil yang dulunya dimiliki oleh Mr. Nico Zain sekarang dimiliki oleh Tn. Dharma seorang WNI yang bekerja sebagai direktur di suatu perusahaan.

Ketentuan:

1. Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dalam hal Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional akan meninggalkan Indonesia sesuai dengan jangka waktu penugasan, Pejabat Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Badan Internasional harus menentukan status pemindahtanganan Barang Kena Pajak dan/atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak yang telah mendapatkan Pembebasan yang dituangkan dalam bentuk laporan pemindahtanganan dan/atau pengalihmanfaatan.
2. Untuk BKP yang harus dilaporkan yaitu BKP dengan kriteria:
 - a. merupakan kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. selain kendaraan bermotor dengan:
 - 1) nilai lebih dari Rp30.000.000,00; atau
 - 2) memiliki masa manfaat lebih dari 4 (empat) tahun.
3. Mr. Nico Zain tidak membuat laporan pemindahtanganan dan/atau pengalihmanfaatan, dengan demikian dapat disimpulkan Mr. Nico Zain menyatakan tidak memindahtangankan barang-barang yang telah diperolehnya yang telah mendapatkan fasilitas Pembebasan.
4. Dengan demikian Tn. Dharma yang harus membayar fasilitas Pembebasan PPN dan PPnBM atas pembelian mobil tersebut. Tn. Dharma harus membayar kembali PPN sebesar Rp55.000.000,00 dan PPnBM sebesar yang dahulu telah mendapatkan fasilitas Pembebasan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI